

Peran Strategis Pusdiklat Bea dan Cukai dalam Penguatan Diplomasi Indonesia

Diplomasi merupakan instrumen utama kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia. Diplomasi menjadi andalan dalam mencapai berbagai kepentingan nasional. Diplomasi juga berperan dalam memproyeksikan national power di pentas dunia. Tak dapat dipungkiri, diplomasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Tatanan diplomasi antar negara di dunia, dikelola dengan mengacu pada Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. Konvensi ini, yang telah diratifikasi hampir seluruh negara di dunia, memberikan landasan bagi prosedur diplomatik, tata hubungan, serta aturan perilaku dalam interaksi antar bangsa. Dewasa ini, hubungan diplomatik secara khusus dilaksanakan oleh pejabat resmi seperti duta besar atau utusan khusus kepala negara dengan memanfaatkan perwakilan luar negeri berupa kedutaan dan konsulat. Namun, secara Umum diplomasi dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Bahkan pelajar sekolah dasar bisa bertindak sebagai duta bangsa pada ajang pertukaran pelajar.

Pusdiklat Bea dan Cukai Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), sejak tahun 2021, menjalankan peran baru sebagai salah satu World Customs Organization (WCO) Regional Training Center (RTC) Asia-Pacific. Sejak saat itu pula, Pusdiklat Bea dan Cukai mulai dikenal dengan nama RTC Indonesia. Dalam peran baru ini, Pusdiklat Bea dan Cukai memperluas stakeholder, dengan mulai melayani kebutuhan pembelajaran pejabat administrasi kepabeanan negara-negara Asia-Pasifik.

Pusdiklat Bea dan Cukai mengawali kiprahnya di ajang diplomasi antar bangsa pada tahun 2020 dengan menyelenggarakan beberapa seminar daring bertajuk Customs Collage - Customs Collaboration Beyond the Edge. Serangkaian seminar ini diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan Pusdiklat Bea dan Cukai menjadi RTC Indonesia. Selain itu, mulai tahun 2021 Pusdiklat Bea dan Cukai mulai menyelenggarakan simposium internasional yang mengundang pejabat kepabeanan dan akademisi dari dalam dan luar negeri. Simposium internasional pertama, pada tahun 2021, diselenggarakan dengan tema "Digital Transformation in Customs". Simposium internasional kedua, pada awal tahun 2022 ini diselenggarakan dengan tema "Customs and Tax Collaboration".

Pelatihan Teknis Kepabeanan Dasar bagi pejabat Timor Leste Customs Authority yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2022 menandai program pembelajaran klasikal pertama. Program ini akan disusul dengan workshop Passenger Assessment yang akan diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2022. Selain itu, pada bulan Desember nanti Pusdiklat Bea dan Cukai juga akan bertindak sebagai host bagi workshop Revised Kyoto Convention yang merupakan program kerja WCO Regional Office for Capacity Building Asia-Pacific (ROCB-AP).

Sebagai RTC Indonesia, Pusdiklat Bea dan Cukai turut berperan dalam memperkuat diplomasi Indonesia. Setidaknya ada tiga bentuk diplomasi yang dijalankan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai, yaitu diplomasi pendidikan, diplomasi ilmu pengetahuan dan diplomasi ekonomi. Diane Whitehead menyatakan bahwa diplomasi pendidikan memupuk kepercayaan untuk mencapai keuntungan bersama dalam mengejar tujuan pendidikan konteks tertentu menggunakan negosiasi dan keterampilan diplomatik lainnya untuk berkomunikasi melintasi batas-batas regional atau nasional atau dengan komunitas lokal yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan (2016). Dalam konteks ini, Pusdiklat Bea dan Cukai melakukan komunikasi antar bangsa dengan banyak stakeholder, antara lain administrasi kepabeanan negara-negara Asia-Pasifik, WCO, ROCB-AP, RTC lainnya di Asia-Pasifik serta ASEAN Secretariat Customs Capacity Building Working Group (CCBWG). Tujuan pendidikan konteks tertentu dalam hal ini adalah meningkatkan kompetensi pejabat kepabeanan negara-negara Asia-Pasifik. Pengembangan pendidikan ini merupakan upaya *levelling-the-playing-field* dalam rangka memperkuat kerjasama antar administrasi kepabeanan di kawasan Asia-Pasifik.

Diplomasi pendidikan tentunya tidak akan dapat dipisahkan dari diplomasi ilmu pengetahuan. Diplomasi ilmu pengetahuan, sebagaimana dinyatakan oleh Nina V Fedoroff, adalah penggunaan kolaborasi ilmiah antar negara untuk mengatasi masalah bersama yang dihadapi umat manusia abad ke-21 dan untuk membangun kemitraan internasional yang konstruktif (2009). Dalam konteks ini, Pusdiklat Bea dan Cukai menyelenggarakan simposium internasional yang menjadi wadah bagi pejabat kepabeanan dan akademisi berkolaborasi dan membangun kemitraan untuk mengatasi masalah-masalah kepabeanan. Simposium seperti ini mendorong penggunaan metode ilmiah dalam memecahkan masalah-masalah dan merumuskan kebijakan kepabeanan. Ke depannya, Pusdiklat Bea dan Cukai akan memfasilitasi kolaborasi penelitian di bidang kepabeanan dan cukai antara pejabat kepabeanan dan akademisi dalam dan luar negeri.

Diplomasi ekonomi adalah bentuk diplomasi yang menggunakan seluruh spektrum instrumen ekonomi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya (2021). Bentuk diplomasi ini merupakan diplomasi yang paling sering dilaksanakan. Pusdiklat Bea dan Cukai dengan menggunakan pendanaan Indonesia Aid mulai menyalurkan bantuan pendidikan bagi pejabat kepabeanan negara-negara Asia-Pasifik. Indonesia Aid yang dikelola Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) menandai perubahan status Indonesia dari negara penikmat hibah menjadi negara donor. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional telah berhasil mengangkat harkat dan martabat bangsa. Dalam konteks ini, Pusdiklat Bea dan Cukai berperan sebagai ujung tombak dalam penyampaian bantuan pendidikan Indonesia Aid kepada negara-negara yang membutuhkan. Pada tahun 2022 ini, pendanaan Indonesia Aid diberikan kepada pejabat kepabeanan dari Timor Leste, Cambodia, Myanmar, Lao, Philippines, Bangladesh, Fiji dan Papua New Guinea.

Dalam menjalankan ketiga bentuk diplomasi di atas, Pusdiklat Bea dan Cukai, sebagai RTC Indonesia, juga melaksanakan fungsi diplomasi. Fungsi diplomasi, sebagaimana dikemukakan Berridge, mencakup komunikasi dan negosiasi (2015). Selain itu, Roach, Griffith dan

O'Callaghan menambahkan fungsi pengumpulan bahan intelijen, pembentukan citra dan penerapan kebijakan sebagai fungsi diplomasi (2013).

Fungsi komunikasi dijalankan Pusdiklat Bea dan Cukai untuk mendapatkan dukungan para stakeholder dalam mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kompetensi pejabat kepabeanan Asia-Pasifik. Komunikasi dijalin dengan administrasi kepabeanan Asia-Pasifik sebagai organisasi yang menaungi para peserta pembelajaran. Komunikasi dengan stakeholder ini juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan pengajar dan pembiayaan. Komunikasi antar bangsa juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari ROCB-AP dan RTC lain di Asia-Pasifik. Komunikasi ini dijalin dalam mengejar tujuan pendidikan konteks tertentu, yaitu konteks pendidikan kepabeanan. Tentunya pendidikan kepabeanan ini ditujukan untuk memajukan perekonomian kawasan Asia-Pasifik melalui percepatan arus barang yang melintasi batas-batas negara.

Fungsi negosiasi dijalankan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai dengan prinsip give-and-take. Dalam negosiasi ini setiap pihak memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan bersama, yaitu peningkatan kompetensi pejabat kepabeanan Asia-Pasifik. Di sisi lain, setiap pihak juga menikmati manfaat dari sinergi ini, berupa peningkatan kinerja administrasi kepabeanan Asia-Pasifik. Dalam negosiasi ini disepakati peran dan kontribusi setiap pihak dengan memperhatikan kedaulatan dan martabat setiap pihak. Proses ini biasanya diawali dengan penyampaian invitation letter dari Pusdiklat Bea dan Cukai. Proses ini kadang dapat diakhiri dengan adanya penandatanganan grant agreement. Dalam proses ini dibutuhkan fleksibilitas, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing pihak.

Fungsi pengumpulan bahan intelijen merupakan bagian penting dalam diplomasi yang dijalankan Pusdiklat Bea dan Cukai. Dalam program pembelajaran yang diselenggarakan, para pengajar Pusdiklat Bea dan Cukai berkesempatan menggali dari para pembelajar luar negeri tentang current issue, best practice, kekuatan dan kelemahan, permasalahan yang dihadapi, serta rencana masa depan administrasi kepabeanan negaranya. Bahan intelijen yang dikumpulkan para pengajar ini memiliki nilai yang sangat berharga bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan luar negeri.

Pembentukan citra Indonesia juga merupakan fungsi yang tak kalah pentingnya. Melalui penyelenggaraan pembelajaran bagi pejabat kepabeanan negara-negara Asia-Pasifik, Pusdiklat Bea dan Cukai menampilkan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai administrasi kepabeanan modern dengan best practice dan inovasi yang patut ditiru administrasi kepabeanan lainnya, dengan skill group owner, subject matter expert serta WCO/regional expert yang mumpuni di berbagai bidang kepabeanan, dengan customs automation, national single window dan national logistic ecosystem handal yang mampu mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Citra DJBC yang cemerlang ini turut menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Citra yang terpancang ini tentunya mendukung diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.

Penerapan kebijakan merupakan suatu keniscayaan dalam diplomasi yang dijalankan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai. Pemilihan prioritas administrasi kepabeanan yang diundang untuk mengirimkan peserta program pembelajaran, pemilihan peserta yang dibiayai oleh Indonesia Aid, serta pemilihan pengajar dan fasilitator mencerminkan penerapan kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui penyelenggaraan program pembelajaran, Pusdiklat Bea dan Cukai menyampaikan kepada seluruh stakeholder apa yang ingin dicapai dalam diplomasi dan bagaimana hal ini akan dicapai. Dalam konteks ini, kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, secara khusus kebijakan DJBC, BPPK dan LDKPI.

Melalui tiga bentuk diplomasi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, dan dengan menjalankan lima fungsi diplomasi komunikasi, negosiasi, pengumpulan bahan intelijen, pembentukan citra serta penerapan kebijakan luar negeri, Pusdiklat Bea dan Cukai secara aktif memperkuat diplomasi Indonesia, utamanya di bidang ekonomi dan kepabeanan. Dengan diplomasi ini, Pusdiklat Bea dan Cukai tidak hanya menjalankan tugas sebagai corporate university bagi DJBC, tetapi juga menjalankan tugas kenegaraan sebagai duta bangsa bagi administrasi-administrasi kepabeanan di dunia, WCO dan ASEAN.

Referensi

- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Chohan, U. W. (2021, February 4). *Economic Diplomacy: A Review* [Repository for preprints]. Social Science Research Network SSRN.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3762042
- Fedoroff, N. V. (2009). Science Diplomacy in the 21st Century. *Cell*, 136(1), P9-11.
<https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.12.030>
- Roach, S. C., Griffiths, M., & O'Callaghan, T. (2013). *International Relations: The Key Concepts* (3rd ed.). Routledge.
- Whitehead, D. (2016, January 19). *Education Diplomacy: A Way Forward for Workforce Development* [Media Network]. Diplomatic Courier.
<https://www.diplomaticcourier.com/posts/education-diplomacy-a-way-forward-for-workforce-development>

Yudhi Dharma Naully

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan